

BUKU PANDUAN

**PENGINTERGRASIAN KEADILAN GENDER DALAM
PROGRAM PERTANIAN, IRIGASI DAN PERIKANAN**

OLEH:

**TIM RELAWAN PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN
(RPUK)**

ATAS DUKUNGAN

BLACK AND VEATCH (BV)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. PENGANTAR	2
	B. PENGERTIAN	5
	1. Konsep Gender	5
	2. Pengarusutamaan Gender	9
	C. MENGAPA PENGARUSUTAMAAN DIPERLUKAN	13
BAB II	MENGINTEGRASIKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM	16
	A. PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER	16
	1. Identifikasi Masalah	19
	2. Mempersiapkan Pendanaan Yang Responsif Gender	20
	3. Mempersiapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak)	20
	4. Mempersiapkan Petunjuk Teknis (Juknis)	22
	5. Mengadvokasi Kebijakan Yang Sensitif Gender	22
	B. METODE PENGEMBANGAN PROGRAM YANG RESPONSIF GENDER	23
	1. Pengembangan Program Menggunakan Metode Participatory Rural Apraisal (PRA)	23
	C. KATEGORI KAJIAN GENDER	37
	a. Perspektif Gender di dalam Daur Program PRA	44
	b. Tehnik-tehnik PRA yang Responsif Gender	47
	c. Langkah-langkah Praktis Pelaksanaan Pertemuan yang Responsif Gender	54
	d. Pelaksanaan Pembangunan Yang Responsif Gender	56
	e. Monitoring Evaluasi Yang Responsif Gender	58
	f. Anggaran Yang Responsif Gender	59
BAB III	BAGAIMANA MENGUKUR TERINTEGRASI PUG DALAM PROGRAM	60
	A. Pengantar	60
	B. Cara Memastikan PUG Diintegrasikan Dalam Program	60
	C. Cara Mengukur	66
	D. Indikator Keberhasilan	67
DAFTAR PUSTAKA		73

KATA PENGANTAR

Pertanian, perikanan dan irigasi adalah tiga sektor di Aceh yang keterlibatan perempuannya sangat tinggi. Namun perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pada ketiga sektor ini. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran, posisi, akses, manfaat dan kontrol perempuan dalam ketiga sektor ini. Untuk menjawab rasa keingintahuan tersebut, atas dukungan Black & Veatch (BV-BRR), RPUK sebagai sebuah lembaga yang konsen pada persoalan-persoalan perempuan melakukan penelitian "Tinjauan terhadap Keadilan Gender dalam Bidang Pertanian, Irigasi dan Perikanan di Nanggroe Aceh Darussalam". Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) desa di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara selama 6 (enam) bulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dibuat sebuah panduan untuk dapat menjadi panduan praktis dalam: **Pengintergrasian Keadilan Gender Dalam Program Pertanian, Irigasi Dan Perikanan**. Panduan ini dapat dipergunakan oleh perencana dan pelaksana proyek khususnya dalam bidang pertanian, irigasi dan perikanan.

Ada banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam kelancaran proses penelitian ini. RPUK mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah berbagi pengalaman, informasi dan dukungan lainnya kepada: BAPPEDA Aceh Barat Daya, Aceh Utara dan Aceh Besar. Kepala Dinas, Staf Program dan Staf Lapangan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sumber Daya Air Aceh Utara dan Aceh Besar serta Subdinas SDA Kab. Abdya. Teman-teman TPP dan FD Kecamatan Babah Rot, Tangan-tangan, Kuala Batee, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Seuneudon dan Matang Kuli. Teman-teman Bina Swadaya Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara. Pengurus P3A dan masyarakat di Desa Padang Bak Jeumpa, Kp. Teungoh dan Pante Rakyat di Aceh Barat Daya.

Desa Punti, Desa Meunasah Sagoe, Desa Ceubrek Tunong dan Desa Siren Pirak di Aceh Utara, serta pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu keberhasilan penelitian dan penyusunan buku panduan ini.

Kami menyadari panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dikemudian hari, dan semoga dapat dipergunakan dalam pelaksanaan proyek sehingga proses dan hasilnya benar-benar memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Selamat membaca dan selamat mengimplementasikan.

Banda Aceh, Akhir Agustus 2007

Khairani Arifin

Sekretaris Jenderal RPUK

PENYUSUN

Khairani Arifin
Siti Maisarah
Seri Rahayu
Leila Juari
Norma Susanti
Erni

Editor dan Layout

Nursiti
Erik Zulkadam

Pengantar

Mengapa Panduan Ini Dibuat?

Minimnya partisipasi Perempuan dalam proses pembangunan khususnya program pertanian, irigasi dan perikanan, membuat program-program yang dijalankan kurang dapat memberikan keadilan kepada perempuan. Pengambil kebijakan umumnya telah membuat banyak kebijakan berkaitan dengan partisipasi dan keadilan jender dalam pelaksanaan program. Akan tetapi di tingkat pelaksana lapangan ada kesulitan untuk mengimplementasikan program secara lebih berpartisipasi dan berkeadilan bagi perempuan. Sehingga untuk mewujudkan program-program yang lebih berkeadilan gender buku panduan ini akan dapat dipakai untuk membantu pelaksanaannya.

Bagaimana Panduan ini Dibuat?

Pembuatan modul ini diawali dengan melakukan sebuah penelitian di 2 (dua) Kabupaten kota, yaitu Aceh Utara dan Aceh Barat daya untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan berkaitan dengan pelaksanaan program Pertanian, Irigasi dan Perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memperkaya modul yang dibuat, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Untuk Siapa Panduan Ini Ditujukan?

Panduan ini ditujukan untuk pelaksana lapangan yang melaksanakan program di sektor pertanian, irigasi dan perikanan. Secara khusus panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaksana lapangan yang melaksanakan program di komunitas. Berdasarkan pengalaman pelaksana lapangan yang dapat memakai panduan ini sebaiknya:

- Punya pemahaman yang baik tentang konsep Gender
- Punya keberpihakan pada perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Punya kemampuan analisis sosial yang kuat.
- Punya komitmen bekerja di komunitas.

BUKU PANDUAN

PENGINTERGRASIAN KEADILAN GENDER DALAM PROGRAM PERTANIAN, IRIGASI DAN PERIKANAN

OLEH:

**TIM RELAWAN PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN
(RPUK)**

ATAS DUKUNGAN

BLACK AND VEATCH (BV)



BAB I PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin. Fakta yang ada sekarang justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan sosial antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya, antara perempuan dengan laki-laki, antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok masyarakat biasa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat miskin yang ada di Indonesia, termasuk di Aceh, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Minimnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus menerus dibebankan untuk melakukan kegiatan reproduktif membuat perempuan semakin miskin dan semakin terpuruk.

Dalam proses pengambilan keputusan, umumnya keputusan-keputusan penting berkaitan dengan pembangunan desa, penyaluran bantuan dan keputusan-keputusan lainnya sebagian besar dilakukan oleh otoritas desa (kepala desa dan perangkat desa) dan masyarakat berpengaruh lainnya. Keterlibatan kelompok masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun pada tingkat yang lebih tinggi masih sangat minim. Hal ini menyebabkan perempuan dan kelompok rentan lainnya masih dianggap sebagai objek pembangunan bukan pelaku pembangunan.

Dalam pembangunan sektor pertanian, irigasi dan perikanan yang merupakan sektor kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat juga terlihat minimnya ruang yang diberikan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif. Jumlah petani perempuan yang hampir sama dengan jumlah petani laki-laki belum membuka kesadaran tentang pentingnya memberi ruang bagi perempuan berkiprah secara aktif untuk pembangunan sektor ini. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, sering kali malah membuat perempuan semakin terpuruk, karena teknologi yang berkembang tidak dirancang untuk dapat digunakan oleh perempuan dan biaya yang digunakan untuk mengakses teknologi tidaklah murah. Penggunaan teknologi kadangkala juga menghilangkan kesempatan perempuan dan kelompok miskin lainnya yang terbiasa berkerja secara tradisional untuk bekerja dan mendapatkan upah atau mengelola lahan dengan biaya murah.

Tidak bisa dipungkiri, teknologi (alat-alat rumah tangga, misalnya kompor gas, blender dll) memang juga dapat membantu mengurangi beban perempuan dalam bidang reproduktif, karena dapat bekerja dengan lebih cepat dan efisien, sehingga akan banyak tersisa waktu untuk berkiprah dalam bidang produktif, politik dan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi teknologi tidak mampu dijangkau oleh semua perempuan, khususnya perempuan miskin, karena untuk memperolehnya dibutuhkan biaya.

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan lembaga-lembaga petani seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air (*P3A/Kejrueu Blang*) juga masih sangat minim, walaupun sebagian besar perempuan Aceh adalah petani, dan merupakan anggota P3A. Apalagi dalam kepengurusan lembaga-lembaga lain, seperti *Panglima Laot* yang anggotanya hampir semua laki-laki.

Dalam kondisi paska konflik dan bencana di Aceh, banyak masyarakat kehilangan sumber ekonomi utamanya, baik dalam bidang pertanian, perikanan

maupun bidang lainnya. Laki-laki lebih mudah untuk beralih usaha, misalnya menjadi buruh bangunan, atau pekerjaan lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak mudah bagi perempuan. Akses mereka pada peningkatan sumber daya sangat minim (misal: mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan kesempatan untuk belajar, jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki) sehingga perempuan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk memainkan aktivitas lain yang bukan merupakan keahliannya (misalnya dalam bidang konstruksi yang jumlah pekerjaannya cukup banyak tersedia saat ini di Aceh, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi paska tsunami), dan bidang ini hampir seluruhnya dikuasai laki-laki.

Masalah lainnya adalah budaya di masyarakat yang memberikan pembatasan aktivitas/pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan membuat kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan semakin kecil, sehingga kemiskinan perempuan semakin besar. Misalnya perempuan tidak dianggap layak untuk berprofesi sebagai nelayan, yang dianggap rawan dan tidak aman, atau perempuan tidak dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi, karena pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga fisik yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Masyarakat dan pemerintah belum menyadari bahwa ada ketimpangan relasi Gender yang berbasis kekuasaan yang berlangsung seperti ini. Hal ini berdampak pada semakin kecilnya peran dan fungsi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kualitas hidup perempuan tidak menjadi lebih baik dan jumlah perempuan miskin semakin bertambah.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dianggap penting untuk menyusun sebuah buku panduan tentang bagaimana mengintegrasikan Gender dalam program-program di masyarakat khususnya dalam sektor pertanian, irigasi dan

perikanan yang merupakan sektor yang paling banyak dilakoni oleh masyarakat Aceh. Buku panduan ini diharapkan dapat dipakai oleh pelaksana lapangan dalam tiga sektor tersebut dalam merencanakan, melaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi program, sehingga program-program yang dijalankan bisa memberdayakan, memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua masyarakat, termasuk kelompok miskin, kepada perempuan dan kelompok *marjinal*/lainnya.

B. PENGERTIAN

1. Konsep Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Gender adalah, perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, menyapu dll) sedang laki-laki dianggap tidak pantas melakukan pekerjaan tersebut.
- 2) Tugas utama laki-laki mengelola lahan pertanian sedang perempuan hanya membantu (Laki-laki diidentifikasi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik di sektor Pertanian, Irigasi maupun Perikanan).

- 3) Laki-laki dianggap lebih pantas menjadi pemimpin masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya (Tuha Peut, Tuha Lapan, Kepala desa, Ketua P3A, dll).
- 4) Kegiatan PKK dan Program Kesehatan Keluarga lebih pantas dilakukan oleh perempuan (hal ini dikaitkan dengan perempuan sebagai orang yang sehari-harinya mengurus, merawat anak dan keluarga).

Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, karena norma-norma adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat berbeda-beda. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan rumah tangga di hampir semua masyarakat, khususnya masyarakat desa dilakukan oleh perempuan, sedangkan di masyarakat perkotaan mulai dianggap lumrah laki-laki dan perempuan membagi tugas rumah tangga karena perempuan juga bekerja mencari nafkah keluarga. Yang menjadi latar belakang perempuan perkotaan bekerja bisa jadi karena tuntutan ekonomi atau bisa juga disebabkan karena perempuan juga memiliki kebutuhan aplikasi diri di ruang publik.
- 2) Dalam pandangan umum masyarakat Aceh menjadi pemimpin lembaga masyarakat lebih pantas dijabat oleh laki-laki, tetapi di kabupaten Aceh Utara ada perempuan (Tetiani) yang menjadi ketua P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air), yaitu P3A *Cukoep Adee* di desa Ceubrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron.
- 3) Di Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya pekerjaan menanam benih padi menjadi tugas perempuan sedangkan di Aceh Barat Daya pekerjaan menanam benih padi dilakukan seluruhnya oleh laki-laki.
- 4) Dinas-dinas yang ada kurang memiliki sensitif Gender dalam pelaksanaan berbagai programnya. Dimana tujuan program umumnya dirumuskan dan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Tidak ada

langkah-langkah khusus sementara (*Affirmative Action*) untuk membuat program dapat diakses dan bermanfaat bagi perempuan. Dinas sebagai representasi pemerintah menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga program-program ditujukan kepada mereka. Namun hasil temuan di kedua wilayah penelitian (Aceh Barat Daya dan Aceh Utara) ternyata banyak perempuan janda yang menafkahi keluarganya. Bahkan ada beberapa *perempuan bersuami* yang memberikan keterangan bahwa keahlian lebih yang mereka miliki (berdagang dan beternak) memberikan pemasukan yang lebih banyak untuk menopang perekonomian keluarga ketimbang pemasukan dari sumber pertanian sawah yang biasanya menjadi dominasi laki-laki.

- 5) Informasi dari otoritas penyusun program di Dinas Perikanan mengatakan bahwa pekerjaan pengelolaan ikan menjadi dominasi kaum perempuan, namun temuan di lokasi pengelolaan ikan pantai Pusong, Aceh Utara Lhokseumawe ternyata perempuan dan laki-laki terlibat dalam kegiatan pengeringan ikan bahkan laki-laki dan perempuan ternyata sama-sama menjadi *toke* dalam usaha pengeringan ikan tersebut.

Gender berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan yang mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, misal:

- 1) Di Aceh Utara, pekerjaan memotong padi sudah dilakukan bersama oleh perempuan dan laki-laki, padahal dulunya memotong padi hanya dilakukan oleh laki-laki.
- 2) Dalam wilayah Aceh Utara, laki-laki juga sudah melibatkan diri dalam kegiatan menyiangi tanaman padi, padahal dulunya kegiatan ini menjadi dominasi perempuan.
- 3) Pada masa lampau sekolah-sekolah dan akademi pertanian hanya meluluskan insinyur laki-laki, namun sekarang banyak perempuan yang sudah bertitel sarjana pertanian.

- 4) Pekerjaan memancing kepiting di tambak hanya dilakukan oleh laki-laki pada masa lampau, namun pada masa sekarang perempuan juga sudah melakukan pekerjaan tersebut karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.

Gender tidak sama dengan kodrat, kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh sang pencipta, sehingga manusia tidak bisa merubah maupun menolaknya. Kodrat adalah sesuatu yang sifatnya universal (tetap sepanjang hayat dikandung badan, pada setiap waktu, pada setiap tempat, misalnya melahirkan, menstruasi, menyusui adalah kodratnya perempuan, dan mempunyai sperma adalah kodratnya laki-laki). Gender adalah pembagian peran laki-laki dan perempuan yang diatur oleh manusia (masyarakat). Gender berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, bahkan di dalam suatu masyarakatpun mengalami perubahan terus, karena Gender bukan kodrat.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan perbedaan yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan.

Gender adalah, perbedaan peran, status, tanggung jawab dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya berdasarkan jenis kelamin, dan merupakan bentukan manusia.

Pembedaan ini sering menciptakan ketidak-adilan, khususnya bagi kelompok miskin dan juga perempuan. Contoh ketidak-adilan yang terjadi diantaranya adalah, adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, akses dan penguasaan perempuan terhadap sumber daya alam rendah, perempuan dan kelompok miskin tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

Ketidak-adilan Gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma ataupun dalam berbagai struktur yang ada di masyarakat.

Persoalan-persoalan ini sudah berlangsung lama, sehingga sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk membangun kesadaran untuk menciptakan keadilan Gender. Keadilan Gender baru dapat terjadi apabila terciptanya suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Istilah Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) tercantum dalam *Beijing Platform of Action* pada tahun 1995 dengan pengertian sebagai berikut: *Gender Mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, programs and projects.*

Berdasarkan Inpres RI No. 9 Tahun 2000, yang dimaksud dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Dalam melakukan pengarusutamaan Gender paling tidak harus menyentuh 3 hal yaitu:

- 1) Memasukkan perspektif Gender dalam perumusan kebijakan di setiap level.
- 2) Menggunakan momentum dan menciptakan ruang dialog yang terus menerus untuk mengembangkan/menularkan perspektif serta membangun jaringan yang dapat dijadikan "sahabat" dalam memperjuangkan keadilan.
- 3) Merumuskan dan membuat model-model pendidikan yang dapat membangun kesadaran, yang dimulai dari rumah tangga, sekolah dan pusat kehidupan masyarakat lainnya.

Penyadaran Gender akan lebih berhasil manakala dilakukan tidak hanya terhadap perempuan, akan tetapi juga terhadap laki-laki karena kesadaran yang muncul dari laki-laki akan berdampak positif kepada perempuan.

a. Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG):

Ada akselerasi (percepatan) informasi tentang PUG sehingga semua pihak memperhatikan perspektif Gender dalam pelaksanaan programnya dan membangun konsen berbagai pihak terhadap persoalan Gender yang ada.

Percepatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif Gender. Program yang responsif Gender adalah program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran.

- Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami *marginalisasi*, sebagai dampak dari bias Gender.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif Gender di bidang masing-masing.

b. Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam melakukan sosialisasi PUG harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Humanisasi
- 2) Menghargai keragaman (pluralistis).
- 3) Bukan pendekatan dikotomis, yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.
- 4) Melalui proses sosialisasi dan advokasi.
- 5) Menjunjung nilai HAM dan demokratisasi.
- 6) Publikasi terbuka yang tidak membedakan kelas, status, kepentingan (interest) dan lainnya, sehingga dapat diterima oleh semua orang.
- 7) Menghindari konfrontasi.

c. Landasan Yuridis Pengarusutamaan Gender (PUG)

Isu Gender merupakan isu yang telah mendunia, dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul yang diakibatkan oleh ketidak-adilan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia. PBB (UN) secara khusus telah mengeluarkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW), untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki banyak peraturan yang dapat menjadi landasan dalam melakukan pengarusutamaan Gender. Diantaranya adalah:

- 1) UUD 45, Pasal 27 ayat (1): Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pasal 1: Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*).
- 3) UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 5 (1): Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- 4) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur secara tegas tentang pengakuan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- 5) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Ketentuan di dalamnya melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan.
- 6) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 7) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 26 ayat (1) butir (b) yang pada intinya mengatur bahwa salah satu tugas Kepala Daerah yaitu melaksanakan pemberdayaan perempuan.
- 8) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

C. Mengapa Pengarusutamaan Diperlukan?

Ketidak-adilan sosial terus terjadi di Indonesia, termasuk ketidakadilan Gender. Ketidak-adilan ini sebagian besar dialami perempuan, walau kadang kala juga dialami oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Dari pengalaman yang ada ketidak-adilan senantiasa menciptakan kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan akibat dari ketidak-adilan, termasuk ketidak-adilan Gender, oleh karenanya ketika mempersoalkan ketidak-adilan Gender dan sekaligus memecahkan persoalan ketidak-adilan Gender maka kita sebenarnya sedang mempersoalkan dan sekaligus juga akan mengatasi masalah kemiskinan.

Persoalan ketidak-adilan sosial dan ekonomi tidak terlepas dari adanya ketidak-adilan Gender. Karena ketidak-adilan Gender berkaitan dengan kehidupan komunitas, baik dalam perilaku sehari-hari, maupun dalam menjalankan peran-peran politik dan sosial, sehingga mengakibatkan berbagai tindakan yang dilakukan semakin memperdalam jurang ketidak-adilan, khususnya bagi perempuan dan masyarakat marjinal lainnya.

Di antara permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang diakibatkan dari adanya ketidak-adilan Gender, khususnya terhadap perempuan di antaranya adalah:

- 1) Masih banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan.
- 2) Pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang bercampur aduk dengan budaya yang tidak berpihak pada perbaikan status perempuan.

- 3) Terbatasnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan jumlah perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan sangat terbatas.
- 4) Diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja.
- 5) Banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.
- 6) Masih banyak budaya dan adat istiadat yang bias Gender.
- 7) Akses dan penguasaan perempuan terhadap sumber daya alam dan informasi yang sangat minim.

Untuk meminimalisir ketidak-adilan ini, maka pengarusutamaan Gender diperlukan. Melalui strategi pengarusutamaan Gender dapat dikembangkan kebijakan, program/proyek dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender serta mempunyai wawasan Gender, sehingga dapat mengurangi ketidak-adilan Gender dan mengantar pada pencapaian kesetaraan dan keadilan.

Selain itu dengan menyelenggarakan pengarusutamaan Gender, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan:

- 1) Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan.
- 2) Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan.
- 3) Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan dan
- 4) Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam melakukan pengarusutamaan Gender diantaranya adalah:

1. Membangun dialog dengan berbagai pihak
2. Melakukan advokasi kebijakan yang responsif Gender.

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang terus menerus terhadap pelaksanaan PUG.
4. Pengimplementasian PUG pada berbagai lembaga.
5. Membangun jaringan dengan berbagai pihak (bersahabat untuk berjuang bersama)

B A B II **BAGAIMANA MENINGTEGRASIKAN PENGARUSUTAMAAN** **GENDER (PUG)** **DALAM PROGRAM**

Mengintegrasikan PUG harus dimulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang responsif Gender, karena hanya dengan demikian kebutuhan perempuan (kelompok yang selama ini diabaikan) akan tertampung dalam program pembangunan di 3 sektor (Pertanian, Irigasi dan Perikanan), perempuan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi, tidak hanya pada jenis program/proyek tapi keterlibatan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi seluruh kebijakan yang mendukung atau berkaitan dengan pelaksanaan program di 3 sektor ini, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Lebih dalam lagi, perempuan tidak lagi menjadi (dijadikan) objek dalam pembangunan tapi dapat ter(di)libat aktif dan bertanggungjawab penuh pada keterlibatannya.

Agar memudahkan kita dalam memahami bagaimana mengaplikasikan analisis Gender tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui beberapa hal sebagai mana yang dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

A. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan pembangunan yang responsif Gender¹ adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan 4 aspek seperti: peran, akses,

¹ BKKBN-Kementerian Negara PP-UNFPA, *Pengarusutamaan Gender*, 2005 hal 122

manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

Temuan penelitian ini dalam kaitannya dengan perencanaan tingkat yang paling bawah yaitu desa yang telah dilakukan, memang kebanyakan dilakukan oleh para laki-laki. Pertanyaannya adalah kenapa laki-laki? Ada beberapa hal yang terlihat jelas menjadi faktor penyebab dalam masyarakat kita untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu :

1. kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di desa kebanyakannya adalah laki-laki (*Tuha Peut, Panglima Laoet, Tuha Lapan, Kejrueblang, LKMD, LMD, Kelompok Pemuda, Imum Meunasah*) kalau dalam persentase bisa disebut sekitar 97%.
2. lembaga-lembaga yang kepemimpinannya adalah perempuan seperti PKK dan pengajian wirid tidak dianggap penting kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan *gampong*.
3. kehadiran masyarakat sendiri dalam perencanaan desa dianggap sudah terwakilkan dengan kehadiran KK (Kepala Keluarga) saja yaitu laki-laki.
4. selain itu ada kondisi bahwa perempuan memang berada dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan ketidakbiasaan mereka mengikuti pertemuan-pertemuan *gampong*, malu, takut, tidak percaya diri dan keadaan yang selama ini tumbuh subur dalam masyarakat setempat bahwa urusan diluar rumah untuk rapat (pertemuan *gampong*) dianggap adalah urusannya lelaki, perempuan cukup dengan mengurus rumah tangga saja.
5. pertemuan *gampong* yang diadakan tidak melihat kemungkinan untuk kehadiran perempuan didalamnya (seringnya pertemuan penting untuk memutuskan sesuatu bagi kepentingan masyarakat desa dilakukan pada malam hari).
6. tidak adanya forum khusus dibuat untuk perempuan dalam rangka untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif memberikan ide-idenya untuk desa.

Persoalan di atas terus menerus menjadi persoalan perempuan secara umum di seluruh Aceh saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir pembangunan yang timpang yang selama ini berlaku dalam masyarakat kita, belum lagi ditambah kondisi baru selesainya konflik dan bencana besar yang dihadapi rakyat Aceh, seharusnya menjadi agenda bersama kita semua untuk meluruskan dan membenarkan jalan pembangunan yang telah timpang dan sangat tidak sensitif terhadap kebutuhan, terutama kebutuhan perempuan sebagai pihak yang tidak terlibat dalam proses tahapan pembangunan secara utuh.

Agenda terpenting dan utama yang harus segera kita lakukan bersama adalah melakukan kerja-kerja penguatan dan pengarusutamaan Gender terhadap semua lini dan pihak yang terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan tentunya para pembuat kebijakan yang sangat mempengaruhi arah pembangunan itu sendiri.

Dalam perencanaan pembangunan yang responsif Gender, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengundang perempuan secara khusus dan langsung.
- 2) Pertemuan khusus untuk forum perempuan bila belum siap dengan pertemuan campuran.
- 3) Pertemuan dilakukan dengan mengambil waktu senggang perempuan (tidak sedang memiliki aktivitas baik di dalam maupun diluar rumah).
- 4) Disediakan tempat khusus bermain bagi anak-anak yang dibawa perempuan.
- 5) Pertemuan campuran antara laki-laki dan perempuan haruslah dilakukan setelah kehadiran perempuan mencapai minimal 40% dari

- jumlah peserta dan mereka haruslah representasi dari forum perempuan.
- 6) Pengambilan keputusan dengan *voting* harus dengan syarat kehadiran perempuan pada saat itu sama banyak dengan laki-laki.
 - 7) Pernyataan perempuan untuk menyatakan “kesetujuannya” terhadap suatu keputusan yang telah diambil haruslah ditanyakan kembali pada kelompok perempuan.
 - 8) Data terpilah atas setiap peran-peran yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
 - 9) Memasukkan nama-nama perempuan dalam tim-tim yang dibentuk sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
 - 10) Penyusunan anggaran sesuai dengan data terpilah yang adil Gender.

1. Identifikasi Masalah

- Identifikasi masalah-masalah kesenjangan Gender dan faktor-faktor penyebabnya. Masalah dan faktor penyebab tersebut dikelompokkan dalam klasifikasi yang ditentukan dan dibahas secara bersama dengan melibatkan dan memperhatikan sektor terkait untuk mendapatkan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi.
- Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan Gender. Biasanya, kesenjangan Gender terjadi karena adanya diskriminasi Gender antara kondisi sebagaimana yang diinginkan (kondisi normatif) dengan konteks yang terjadi (kondisi objektif) yang mengakar dalam tradisi dan kebiasaan lokal dan didukung oleh peraturan dan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.
- Mengidentifikasi kesenjangan Gender dari berbagai aspek antara lain: peran, akses, kontrol dan manfaat untuk menyusun isu Gender.

- Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi/ tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.

2. Mempersiapkan Pendanaan yang Responsif Gender

Pendanaan yang reponsif Gender adalah menyiapkan dana secara khusus, untuk program-program penguatan dan pemberdayaan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas/potensi agar memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki di bidang pertanian, pengairan dan perikanan.

Penyusunan dana ini haruslah melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif untuk secara bersama-sama akan menetapkan program prioritas. Pengalokasiannya harus untuk membiayai kebutuhan praktis dan/atau kebutuhan strategis Gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki. Misalnya *affirmative action* bagi petani perempuan di pantai Timur, karena pembibitan lebih banyak dilakukan oleh perempuan, maka dilakukan penyuluhan pembibitan organik yang baik kepada kelompok perempuan. Jadi, bukan dengan menggunakan dana sisa atau cadangan, dimana pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan menjadi tidak prioritas akibat harus menunggu dana sisa.

3. Mempersiapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak)

Mengingat dalam kesenjangan Gender, perempuan berada dalam posisi yang paling tidak diakui maka perlu diperhatikan beberapa metode berikut :

- Menyediakan peluang peningkatan kapasitas khusus untuk perempuan. Sudah cukup lama, keberadaan perempuan berada pada kelas no 2 (subordinasi) dalam mengakses kegiatan pemberdayaan yang diberikan untuk masyarakat. Karena keberadaannya yang kurang dianggap, sehingga seluruh kegiatan pemberdayaan diserahkan kepada laki-laki. Kondisi ini mengakibatkan perempuan tidak dilibatkan dalam beberapa forum dan kegiatan publik dengan alasan keterbatasan kemampuan yang

dimiliki oleh perempuan. Untuk menyetarakan kesempatan terlibat dalam kegiatan dan pertemuan publik, maka harus disediakan kesempatan khusus untuk perempuan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat bersaing secara sportif dengan kelompok laki-laki.

- Menyediakan porsi khusus untuk menyengajakan melibatkan perempuan di seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada tahap awalnya, kehadiran perempuan sangatlah penting sebagai pengalaman perempuan untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri perempuan berada dalam forum publik (laki-laki), sebelum mengharapkan keaktifan perempuan. Target ini perlu diperhatikan mengingat pada masa lampau, perempuan tidak dibiasakan untuk mengambil peran aktif dalam forum-forum publik. Demikian juga pada tahapan perencanaan dan pengawasan serta monitoring. Menyediakan peran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perempuan menjadi strategi untuk mempercepat peningkatan kemampuan perempuan.
- Memfasilitasi dan memediasi forum khusus perempuan. Karena terlalu lama tidak dilibatkan dan tidak diakui, sehingga perempuan tidak memiliki rasa percaya diri yang baik dalam mengutarakan pendapat dihadapan kelompok laki-laki. *Affirmative action* yang tepat untuk menjembatani kondisi ini adalah dengan memfasilitasi dan memediasi perempuan untuk berkumpul dalam kelompoknya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dan menyampaikan solusi alternatif yang mereka pikirkan. Hasil dari pertemuan khusus ini akan disampaikan pada forum publik yang lebih luas yang harus disikapi secara adil dan setara oleh seluruh peserta forum.

4. Mempersiapkan Petunjuk Teknis (Juknis).

Petunjuk teknis dibutuhkan untuk menjabarkan kebutuhan teknis bagi keterlibatan perempuan dalam pertemuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

5. Mengadvokasi Kebijakan yang Sensitif Gender

Dalam sebuah program menjadi sangat penting, untuk itu maka perlu dipastikan beberapa hal:

- Mengadvokasi lahirnya kebijakan dalam di sektor Pertanian, Pengairan dan Perikanan yang responsif Gender pada tingkat nasional, kabupaten bahkan tingkat desa. Untuk mengadvokasikan kebijakan, terlebih dahulu haruslah dipastikan perspektif Gender yang dimiliki oleh para pengambil dan pembuat kebijakan tersebut sudah cukup memadai untuk merumuskan sebuah kebijakan yang sensitif Gender.
- Bila perspektif yang dimiliki masih sangat lemah, dibutuhkan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan sensitifitas Gender melalui sosialisasi pemahaman Gender dan pelatihan teknis analisis Gender.
- Untuk melaksanakannya, dibutuhkan alat-alat yang disiapkan secara sistematis, baik alat untuk melakukan analisis, pelatihan (modul) ataupun alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang partisipatif Gender.
- Memfasilitasi dan memediasi mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lapangan.

B. Metode Pengembangan Program yang Responsif Gender

1. Pengembangan Program Menggunakan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA)

Dalam melakukan kerja-kerja penguatan, penggalian kebutuhan dan menampung aspirasi masyarakat dalam sebuah perencanaan yang responsif Gender, dapat dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Menurut *Chambers (1992) Participatory Rural Appraisal²* / Kajian Partisipatif Desa adalah kumpulan teknik untuk memberdayakan masyarakat dalam menganalisa, mengembangkan dan berbagi pengetahuan tentang kehidupan setempat, keadaan dan sumber daya, untuk berencana dan bertindak dengan lebih baik.

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kata "*partisipasi*" masyarakat disini diterjemahkan sebagai "keikutsertaan" masyarakat. Berkaitan dengan hal ini harus ada usaha untuk menyediakan ruang khusus agar perempuan dapat terlibat dalam proses merancang program pembangunan desanya bukan hanya sebagai pendengar tapi juga ikut memberikan saran dan pendapatnya. Proses fasilitasi PRA dilakukan oleh "orang luar" yaitu petugas lembaga-lembaga pembangunan masyarakat yang memiliki program di desa (dalam hal ini pelaksana program ETESP Pertanian, Perikanan dan Irigasi). Masyarakat juga berperan aktif melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap rancangan program pembangunan tersebut.

² Care, *Indeks Bahan Presentasi; Modul Pelatihan Analisis Gender, 2005*

Metode PRA merupakan metode pembelajaran masyarakat. Teknik-teknik kajian keadaan masyarakat yang terdapat dalam metode PRA digunakan sebagai alat pada proses belajar dengan masyarakat. Metode ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah melalui kantor dinas maupun ketiga sektor program ETESP berperan sebagai fasilitator yang memudahkan terlaksananya program-program hasil rancangan bersama masyarakat. Kegiatan PRA bukanlah pelibatan masyarakat dalam sebuah “paket” penerapan PRA melainkan dalam sebuah proses berkesinambungan selama berkegiatan bersama, antara penyelenggara program dan masyarakat.

1. Prinsip-Prinsip Participatory Rural Appraisal (PRA)

PRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat sebagian besar lapisan masyarakat tetap berada di pinggir arus pembangunan yang berjalan cepat. Perempuan dan masyarakat miskin biasanya masuk dalam lapisan masyarakat ini. Karena itu, prinsip PRA yang paling pertama ialah mengutamakan masyarakat yang terabaikan tersebut agar memperoleh kesempatan untuk memiliki peran dan mendapat manfaat dalam kegiatan program pembangunan. Keberpihakan terhadap golongan masyarakat yang terabaikan ini bukan berarti bahwa golongan masyarakat lainnya perlu mendapat giliran untuk diabaikan atau tidak diikutsertakan. Keberpihakan ini lebih pada upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang terdapat di suatu masyarakat, dengan mengutamakan golongan paling miskin atau golongan yang paling tidak berdaya agar kehidupannya meningkat.

b. Pemberdayaan (Penguatan Masyarakat)

Pendekatan PRA bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat. Kemampuan itu ditingkatkan di dalam proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan

dan penentuan kebijakan, sampai pada pemberian penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung. Dengan kata lain masyarakat baik perempuan maupun laki-laki memiliki peluang/kesempatan dan kemampuan yang sama untuk memberikan keputusan/memilih terhadap berbagai keadaan yang terjadi di seputar kehidupannya. Dengan demikian masyarakat (petani dan nelayan) yang terdiri atas perempuan dan laki-laki bisa mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang datang dari luar desanya, apalagi jika bantuan tersebut bersifat merugikan (melemahkan posisi masyarakat).

c. Masyarakat sebagai pelaku utama, orang luar sebagai fasilitator

Metode PRA menempatkan masyarakat (perempuan dan laki-laki) sebagai pusat dari kegiatan pembangunan. "*Orang Luar*" harus menyadari perannya sebagai "*fasilitator*" dan bukannya "guru" ataupun penyuluh. Hal ini mudah diucapkan tapi tetap saja sulit ketika harus direalisasikan, karena ada anggapan bahwa perempuan dan masyarakat miskin itu bodoh.

d. Saling belajar dan menghargai perbedaan

Salah satu prinsip dasar adalah pengakuan akan pengalaman tradisional masyarakat dengan penekanan pada pengalaman perempuan yang beraktivitas di sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi. Kenyataan memperlihatkan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya telah terbukti pula bahwa pengetahuan "modern" yang diperkenalkan oleh "*orang luar*" tidak juga memecahkan masalah mereka karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan dalam banyak kasus, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya harus dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan orang luar saling

melengkapi dan sama bernilainya. Proses “PRA” adalah ajang komunikasi antara kedua sistem pengetahuan itu untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik.

e. Mengoptimalkan hasil

Dalam upaya mengumpulkan informasi seringkali dilakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya, dan ternyata banyak dari informasi tersebut yang tidak diperlukan atau dipergunakan. Walaupun sudah banyak teknik PRA yang dipergunakan untuk mengkaji, tetapi tim pemandu seringkali merasa bahwa informasi yang terkumpul belum lengkap atau belum mendetail. Tim pemandu pada saat persiapan perlu merumuskan secara jelas, jenis dan tingkat kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hanya, jangan lupa bahwa kebutuhan informasi tim pemandu semestinya menyerap juga pendapat masyarakat dengan cara mengajukan pertanyaan khusus untuk kelompok perempuan dan laki-laki tentang informasi yang menurut mereka lebih penting daripada yang dirumuskan oleh tim pemandu.

f. Pertukaran informasi (Triangulasi)

Salah satu kegiatan PRA adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis bersama masyarakat. Usaha itu akan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada. Namun kita tahu, tidak semua sumber informasi itu senantiasa bisa dipercaya ketepatannya. Untuk mendapatkan informasi yang kedalamannya bisa diandalkan kita bisa menggunakan triangulasi yang merupakan bentuk “pemeriksaan dan pemeriksaan ulang” informasi. Triangulasi dilakukan melalui penganeekaragaman tim (keragaman disiplin ilmu dan pengetahuan), penganeekaragaman sumber informasi (keragaman latar belakang golongan masyarakat, keragaman tempat, jenis kelamin) dan variasi teknik.

- **Keragaman Teknik PRA**

Setiap teknik PRA mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh, dibahas dan dimanfaatkan dengan satu atau dua teknik saja. Karenanya, bersama masyarakat kita harus bisa melihat bagaimana teknik-teknik *PRA* dapat saling melengkapi, sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan program.

- **Keragaman Sumber Informasi**

Masyarakat selalu memiliki bentuk hubungan yang kompleks (rumit) dan memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan. Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang diwarnai oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, sangat perlu mengkaji silang informasi dari sumber informasi yang berbeda asalkan relevan atau berhubungan. Informasi dari kelompok elit masyarakat perlu dikaji silang dengan informasi dari masyarakat biasa, demikian juga informasi dari kelompok laki-laki perlu dikaji silang dengan pendapat perempuan, juga informasi dari sumber lainnya saling dikaji silang, seperti dari kelompok kaya dan miskin, kelompok tua dan muda dan sebagainya.

- **Keragaman Latar Belakang Tim Pemandu/Tim PRA**

Pelaksanaan kajian dengan teknik-teknik PRA bisa dilakukan oleh perorangan (misal oleh petugas lapangan dalam menjalankan kegiatannya) maupun secara khusus oleh sebuah tim yang terdiri dari sejumlah orang (misal dalam kajian keadaan yang cukup luas untuk perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan yang sudah berlangsung

sekian lama). Dalam hal penerapan PRA dengan tim semacam ini dianjurkan keberagaman latar belakang tim, baik itu dari segi pendidikan, pengalaman, jenis kelamin maupun ketrampilan.

g. Orientasi praktis

PRA berorientasi praktis, yakni pengembangan kegiatan. Untuk itu dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai, agar program yang dikembangkan bisa memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena itu *PRA* bukanlah kegiatan yang dilakukan demi *PRA* itu sendiri. *PRA* hanya sebagai alat atau metode yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program-program yang dikembangkan bersama masyarakat. Penerapan metode *PRA* tidak hanya sekedar untuk menggali informasi dari masyarakat, tetapi menindaklanjutinya ke dalam kegiatan bersama.

h. Keberlanjutan dan Selang Waktu

Kepentingan-kepentingan dan masalah masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah dan bergeser menurut waktu sesuai dengan berbagai perubahan dan perkembangan baru dalam masyarakat itu sendiri. Karenanya pemahaman masyarakat bukanlah usaha yang sekali dilakukan kemudian selesai, namun merupakan kegiatan berkelanjutan. Metode "*PRA*" bukanlah "paket kegiatan *PRA*" yang selesai setelah kegiatan penggalan informasi dianggap cukup, lalu orang luar yang memfasilitasi kegiatan keluar dari desa.

PRA merupakan metode yang harus dijiwai dan dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program yang mereka kembangkan secara terus menerus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar *PRA* yang coba menggerakkan potensi masyarakat.

i. Santai dan Informal

Kegiatan *PRA* diselenggarakan dalam suasana yang bersifat fleksibel, terbuka, tidak memaksa dan informal. Situasi yang santai ini akan menimbulkan hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota masyarakat, bukan sebagai “tamun asing” yang oleh masyarakat harus disambut dengan segala protokol. Terkadang menjadi tradisi bagi masyarakat desa untuk menerima kedatangan orang diluar komunitasnya dengan semacam penyambutan, seperti berkumpulnya para tokoh adat dan pemerinah desa, jamuan dan tarian adat. Barangkali suasana santai dan informal ini lebih cocok disebutkan sebagai salah satu tips untuk pemandu, hal ini menjadi prinsipil karena sering dilanggar. Penerapan *PRA* diharapkan untuk sama sekali tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Orang luar harus memperhatikan jadwal kegiatan masyarakat bukan sebaliknya masyarakat diharuskan mengikuti jadwal orang luar dalam kegiatan *PRA* yang biasanya dibatasi oleh waktu.

j. Belajar dari Kesalahan

Melakukan kesalahan dalam kegiatan *PRA* adalah sesuatu yang wajar, yang terpenting bukanlah kesempurnaan dalam penerapannya, yang tentu sukar dicapai, melainkan penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian, kita belajar dari kekurangan-kekurangan/kesalahan yang terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Satu hal yang lebih penting diingat adalah bahwa kegiatan *PRA* bukanlah kegiatan “coba-coba” yang tanpa perhitungan. Kita harus meminimalkan dan mengurangi kesalahan.

k. Terbuka

Prinsip ini menganggap *PRA* sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, sempurna dan pasti benar. Diharapkan bahwa teknik-teknik itu senantiasa bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Sumbangan-sumbangan dari mereka yang langsung menerapkan dan

menjalankannya di lapangan untuk memperbaiki konsep, pemikiran maupun merancang teknik-teknik baru, akan sangat berguna dalam memperkaya metode ini.

Program pemberdayaan atau pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, LSM, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya ditingkatan desa sangat penting memperhatikan isu Gender. Hal ini didasari pemikiran adanya ketimpangan Gender yang perlu diperbaiki untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Artinya, seluruh potensi sumber daya manusia (baik laki-laki dan perempuan) dipergunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Selain itu isu Gender perlu diperhatikan untuk menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan. Artinya, tidak ada kelompok atau golongan yang memiliki kesempatan dan hak yang timpang (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai ciri dari masyarakat yang baik.

Selain alasan yang mendasar di atas, juga terdapat alasan-alasan praktis mengenai pentingnya memperhatikan isu Gender di dalam pengembangan program, yaitu setiap program seringkali sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu sebagai rasa tanggung jawab, kita semestinya mempertimbangkan dan memperhatikan agar pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif (melemahkan ketimpangan), bukan pengaruh negatif (memperkuat ketimpangan).

Berikut ini adalah beberapa program-program yang tidak peka Gender mempengaruhi secara merugikan:

Kasus Revolusi Hijau dan Pengangguran

Dengan semakin banyaknya program-program mekanisasi pertanian dewasa ini, banyak tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan, yang tersisih. Tetapi perempuan banyak tersisih di beberapa jenis kegiatan pertanian yang memerlukan ketrampilan tangan. Misalnya: pengendalian hama dengan teknologi baru menyebabkan perempuan kehilangan perannya sebagai penyedia ramuan tradisional untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman padi di daerah Abdya. Perontokan padi dengan mesin juga mengurangi peran perempuan, padahal sebelum mesin perontok padi dikenal luas dalam teknologi pertanian, petani Aceh utara biasanya melakukan kegiatan "*ceumelhee*" (merontokkan bulir padi dari batangnya setelah pemotongan) secara bersama dengan melibatkan perempuan dan laki-laki dan kegiatan ini kebanyakan dilakukan pada malam hari. Penggunaan mesin perontok padi juga telah menyebabkan kegiatan "*keumeurui*" (pemisahan bulir padi kualitas bagus dengan yang kurang baik/kosong karena hama atau dimakan burung dengan menggunakan kekuatan angin), tidak lagi perlu dilakukan lagi, padahal kegiatan "*keumeurui*" sebelum adanya mesin perontok padi selalu dilakukan oleh kaum perempuan

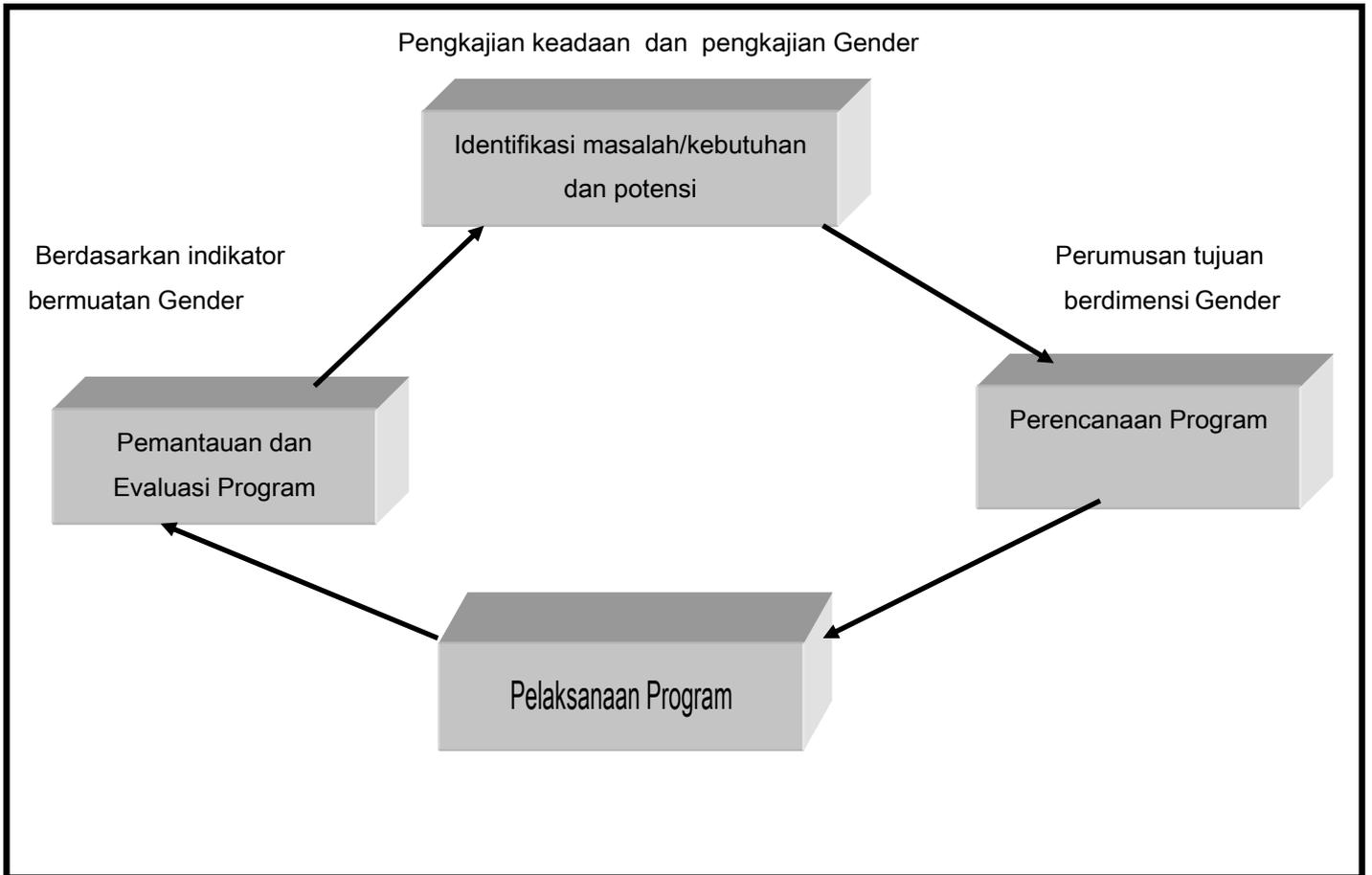
Kasus: Menambah Beban Kerja Perempuan

Sebuah program pembangunan saluran irigasi di wilayah Kab. Aceh Utara, membangun saluran irigasi premier yang melewati pemukiman penduduk. Pelaksana proyek tidak melibatkan perempuan dalam proses perencanaan pembangunannya. Akibatnya tangga-tangga khusus yang dibangun di beberapa bagian saluran irigasi untuk memudahkan perempuan mencuci justru tidak dapat difungsikan secara maksimal oleh kaum perempuan, karena konstruksinya yang terlalu curam dan licin menyebabkan perempuan kesulitan melakukan kegiatan menyikat dan membilas pakaian langsung di tangga-tangga tersebut.

Perempuan yang memanfaatkan air saluran irigasi tersebut untuk kebutuhan mencuci akhirnya membuat tempat cucian tersendiri dari papan berdekatan dengan tangga-tangga yang telah dibangun tersebut. Selanjutnya mereka mengangkat air untuk keperluan membilas pakaian dengan menggunakan timba. Dalam kasus ini tangga tetap berfungsi tapi hanya sebagai alat bantu agar perempuan bisa turun dan mengambil air dengan timba di saluran irigasi tersebut. Padahal jika perempuan dilibatkan untuk merencanakan pembangunan tempat mencuci tersebut maka pekerjaan perempuan menjadi lebih ringan dan efisien karena mereka bisa langsung membilas di saluran irigasi melalui anak tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, tanpa takut terjatuh, mereka juga tidak perlu mengangkat atau menimba air untuk keperluan membilas

Program yang responsif gender adalah program yang dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek atau dimensi gender ke dalam setiap tahap program, yaitu pada saat peninjauan kebutuhan dan perencanaan program, juga pada saat pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Artinya, ketika konsultan Proyek ETESP memfasilitasi kegiatan perancangan program untuk sektor perikanan, pertanian dan irigasi sangat penting untuk memperhatikan dan mengkaji secara khusus aspek-aspek gender yang dianggap timpang dan perlu diperbaiki melalui program. Ketika program dilaksanakan, aspek gender yang timpang tersebut benar-benar ditangani (bukan hanya ada di rancangan program agar proposalnya disetujui oleh donor, tapi juga harus dilaksanakan). Juga ketika dilakukan penilaian (monitoring dan evaluasi), aspek gender harus menjadi salah satu aspek penilaian yang benar-benar diperhatikan.

Bagan berikut menggambarkan pengintegrasian gender dalam tahapan program



Contoh penggunaan teknik PRA yang responsif gender

Program responsif gender dapat dikembangkan dengan cara melakukan pengkajian untuk mengetahui bentuk-bentuk ketimpangan gender yang terjadi di dalam masyarakat dan perlu untuk ditangani. Hasil pengkajian gender kemudian menjadi bahan untuk merancang program, yang terdiri atas tujuan praktis dan tujuan strategis program, serta indikator-indikator pencapaian tujuan yang akan dipergunakan sebagai acuan pada proses monitoring dan evaluasi program nantinya. Rumusan ini juga harus dapat digunakan untuk melakukan penilaian perkembangan posisi dan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program.

Dalam kaitannya dengan tahapan perumusan program partisipatif yang sudah mulai dilakukan oleh tim kerja ETESP irigasi melalui Pertemuan PLENO, yang terdiri atas Pleno I – IV, sejauh ini sudah ada usaha untuk melibatkan perempuan dalam proses pelaksanaannya, meskipun tingkat keterlibatannya masih cukup minim dan belum memadai. Untuk itu disarankan untuk terus memperbaiki apa yang telah dicapai, perbaikan strategi bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Membuat pertemuan khusus dengan kelompok perempuan sebelum pleno I dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dan identifikasi kebutuhan khusus perempuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Pertemuan khusus bisa juga dilakukan dengan cara berkunjung ke pertemuan atau ajang berkumpul perempuan desa. Misalnya: ketika ada acara PKK, wirid yasin, warung tempat perempuan berbelanja di pagi hari atau tempat-tempat perempuan

berkumpul untuk mencuci atau mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pertemuan khusus ini sebaiknya difasilitasi oleh perempuan atau setidaknya ada perempuan yang terlibat dalam tim fasilitator/penjajagan kebutuhan masyarakat. Untuk memudahkan interaksi dengan perempuan desa yang sangat jarang terlibat dalam pertemuan multi gender.
- Informasi yang didapatkan dari pertemuan ini harus dicatat sedetail mungkin, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk berdiskusi dalam pertemuan Pleno yang melibatkan perempuan dan laki-laki.
- Pelaksanaan pertemuan Pleno I - III diharapkan untuk melibatkan perempuan dengan komposisi yang lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mendorong proses membangun kepercayaan diri dari kaum perempuan desa dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya menyangkut pelaksanaan proyek.
- Perempuan yang diharapkan kehadirannya dalam pertemuan Pleno, disarankan untuk dikirimkan undangan khusus. Jika perlu pihak keluarga (suami) juga diberitahu.
- Undangan khusus dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pertemuan Pleno juga dapat disosialisasikan melalui aparat desa dan tokoh agama. Hal ini penting dilakukan mengingat pemahaman yang tumbuh di masyarakat bahwa yang layak hadir di pertemuan yang membicarakan pembangunan desa adalah laki-laki. Aparatur desa dan tokoh agama diharapkan dapat membantu merubah pemahaman tersebut.
- Dalam setiap pertemuan Pleno diharapkan melibatkan konsultan gender, jika konsultan tidak tersedia maka kehadiran fasilitator perempuan adalah hal yang harus dipenuhi oleh pelaksana program. Jika fasilitator perempuan belum tersedia, maka sebaiknya tenaga lapangan yang memfasilitasi pertemuan Pleno diharapkan sudah memiliki kepekaan

mengenai kebutuhan, perbedaan peran dan kedudukan perempuan di wilayah pelaksanaan program. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan dapat diintegrasikan dalam tahapan program.

C. Kategori Kajian Gender

Kategori kajian gender adalah: bidang-bidang kehidupan masyarakat yang memberikan gambaran tentang perbedaan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki di dalam suatu masyarakat.

Kategori pengkajian gender terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Pembagian kerja laki-laki dan perempuan.
2. Peluang (akses) dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya.
3. Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga formal dan informal.
4. Pengambilan keputusan dalam keluarga.

Berikut adalah tabel mengenai 4 kategori tersebut yang dikembangkan oleh para ahli untuk meneliti kondisi ketimpangan tersebut;

Kategori Kajian Gender: Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan

Informasi Yang Dikaji	Yang Diidentifikasi (yang ditemukan)	Tujuan Kajian Gender (untuk Program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa (P/L) yang melakukan kegiatan apa (Produktif, reproduktif, sosial) • Kapan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan masing-masing kegiatan tersebut • Perbandingan volume kerja (beban kerja) P dan L • Perbandingan pendapatan P dan L yang dihasilkan setiap jenis pekerjaan/kegiatan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah/kebutuhan yang dirasakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga • Perbedaan masalah/kebutuhan P dan L 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan kegiatan atau usaha masyarakat yang memiliki potensi untuk dikaitkan atau dikembangkan melalui program ETESP tiga sektor • Mendiskusikan waktu yang tersedia pada masyarakat (P/L) untuk membuat program • Mendiskusikan potensi khusus P saja atau L saja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan dan pendapatan P atau L yang dianggap penting untuk dikuatkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari pelaksanaan program sektor pertanian, perikanan dan irigasi. • Penyadaran Gender : penyadaran tentang perlunya pembagian peran/tugas P dan L di berbagai kegiatan (biasanya P kurang keikutsertaannya dalam menentukan pembagian tugas).

Kategori Kajian Gender: Peluang dan Penguasaan Perempuan & Laki-laki terhadap Sumber Daya

Informasi yang Dikaji	Yang diidentifikasi (yang Ditemukan)	Tujuan Kajian Gender (untuk Program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa (P/L) yang memiliki peluang (akses) dan penguasaan (kontrol) terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sumber daya fisik(misal : tanah, modal, peralatan, dsb) ○ Pasar komoditi (untuk membeli dan menjual barang) dan pasar kerja ○ Sumber daya sosial budaya (misal : informasi, pendidikan, latihan, dsb) • Siapa (kelas sosial mana) yang memiliki sumber daya ? • Siapa (kelas sosial mana, P/L) yang memperoleh manfaat dari sumber daya yang ada? 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah/kebutuhan apa yang berhubungan dengan sumber daya. • Perbedaan masalah/kebutuhan sumber daya menurut P/L. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan keadaan sumber daya dan potensi peningkatan keadaan sumber daya yang bisa dikembangkan melalui program pertanian, perikanan dan irigasi, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Mendiskusikan potensi P dan L untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program ETESP baik untuk sektor pertanian, perikanan maupun irigasi • Penyadaran Gender : penyadaran tentang perlunya pembagian tugas P dan L mengenai sumber daya (biasanya P kurang terlibat menentukan penggunaan sumber daya).

**Kategori Kajian Gender: Partisipasi Perempuan & Laki-laki dalam Lembaga
Formal dan Non Formal**

Informasi Yang Dikaji	Yang Diidentifikasi (yang ditemukan)	Tujuan Kajian Gender (untuk Program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga-lembaga formal dan informal di desa yang mungkin bisa berkaitan dengan pengembangan program (misal : TUHA PEUT, TUHA LAPAN, kelompok tani, koperasi, kelompok simpan pinjam, arisan, kelompok agama, P3A, dsb). • Siapa (P/L) yang terlibat di dalam kegiatan lembaga-lembaga tersebut • Hirarki wewenang (susunan kepemimpinan) yang ada di dusun/ 	<p>Masalah/kebutuhan yang muncul mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan lembaga yang dianggap penting oleh masyarakat • Peran serta masyarakat di dalam kegiatan lembaga (baik P maupun L) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Bagaimana perbedaan jumlah P dan L di dalam lembaga (partisipasi kuantitatif) ○ Bagaimana perbedaan peran dan kedudukan P dan L (partisipasi kualitatif). 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk bekerjasama dalam pengembangan program ETESP pertanian, perikanan dan irigasi • Mendiskusikan peran serta masyarakat (P atau L) untuk mengembangkan lembaga yang berhubungan dengan ketiga sektor program ETESP • Penyadaran Gender : penyadaran tentang perlunya peran P dan L secara seimbang di berbagai kegiatan lembaga (biasanya P kurang terlibat dalam kegiatan

desa/mukim, ini sangat berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.		kemasyarakatan atau bukan pengambil kebijakan di dalam lembaga)
-----------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------

Kategori Kajian Gender: Pola Pengambilan Keputusan di Dalam Keluarga

Informasi Yang Dikaji	Yang Diidentifikasi (yang ditemukan)	Tujuan Kajian Gener (untuk Program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi)
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa P/L yang menentukan keputusan-keputusan penting di dalam keluarga. • Siapa (P/L) yang bertanggung jawab (mengerjakan apa) di dalam keluarga. • Siapa (P/L) yang memperoleh manfaat dari keputusan-keputusan tsb. 	<p>Masalah / kebutuhan yang muncul mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian kerja (beban kerja) di dalam keluarga. • Perbedaan peran P/L dalam pengambilan keputusan di keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan potensi-potensi keluarga petani, petambak dan nelayan baik P maupun L untuk terlibat di dalam kegiatan /program ETESP di sektor pertanian, perikanan dan irigasi. • Penyadaran tentang perlunya saling memperhatikan kebutuhan mengembangkan diri (antara P dan L) untuk kemajuan keluarga.

Hasil dari kajian gender berdasarkan kategori di atas adalah sejumlah informasi yang merupakan keadaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi. Kajian ini juga memberikan gambaran mengenai perbedaan keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang menjadi sasaran program.

Kajian aspek-aspek kehidupan masyarakat tersebut pada akhirnya akan menghasilkan identifikasi MASALAH dan KEBUTUHAN yang dirasakan oleh masyarakat dan perlu dikembangkan.

Tabel berikut menggambarkan tujuan dilakukannya kajian gender:

<p>Masalah dan Kebutuhan Praktis</p>	<p>Yaitu masalah kebutuhan yang perlu dipecahkan dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program.</p>	<p>Kepentingan praktis gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperhatikan perbedaan masalah/kebutuhan khusus laki-laki dan masalah/kebutuhan khusus perempuan. ✓ Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak, serta secara khusus memperhatikan kebutuhan perempuan agar tidak terabaikan sebagai pemanfaat hasil pelaksanaan program ETESP.
<p>Masalah dan kebutuhan strategis</p>	<p>Yaitu masalah dan kebutuhan yang perlu diperjuangkan dalam jangka panjang, untuk memberdayakan atau menguatkan masyarakat agar bisa secara mandiri menyelenggarakan kehidupan yang lebih baik.</p>	<p>Kepentingan strategis gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengembangkan program agar tercapainya perubahan sosial dimana masyarakat miskin diberdayakan (dikuatkan) ✓ Memperhatikan secara khusus penguatan keadaan dan kedudukan perempuan agar memiliki kedudukan dan keadaan yang setara dengan laki-laki.

Tujuan Pendek Tujuan Gender	angka yaitu: Praktis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyadaran masyarakat tentang keadaan mereka dalam aspek kehidupan yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan program ETESP sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi, termasuk yang menyangkut perbedaan keadaan dan kedudukan laki-laki dan perempuan. ▪ Pengembangan program ETESP dari ketiga sektor berdasarkan kebutuhan (praktis maupun strategis) yang dirasakan oleh masyarakat, serta program yang responsif gender (program yang memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki untuk jangka pendek dan jangka panjang).
Tujuan Panjang Tujuan Gender	Jangka yaitu: Strategis	Perubahan keadaan masyarakat (perubahan sosial) melalui peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang disertai dengan penguatan kelompok perempuan sehingga ketimpangan gender bisa dikurangi atau dihilangkan. Artinya, dengan memperhatikan pemberdayaan (penguatan) kelompok perempuan secara khusus.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang program responsif gender:

	Metode PRA	Perspektif Gender
Cita-cita	Perubahan sosial melalui pemberdayaan (penguatan) masyarakat agar masyarakat mampu mengatasi masalah/kebutuhannya sendiri.	Perubahan sosial melalui pemberdayaan (penguatan) masyarakat dengan memperhatikan juga pemberdayaan perempuan.
Proses	Pendidikan masyarakat melalui pengembangan program agar	Pendidikan masyarakat melalui pengembangan program yang juga memperhatikan peningkatan

	setahap demi setahap mampu mengembangkan kemampuannya sendiri.	kemampuan perempuan.
Tujuan	<p>Tujuan praktis: pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Tujuan strategis: mencapai cita-cita perubahan sosial dan penguatan masyarakat, peningkatan taraf hidupnya juga berarti perubahan perilaku masyarakat.</p>	<p>Tujuan praktis: sama, tetapi dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis Gender.</p> <p>Tujuan strategis : sama, tetapi dengan memperhatikan secara khusus penguatan perempuan agar perubahan sosial mencakup pengurangan ketimpangan perempuan dan laki-laki.</p>
Sasaran dan Pemanfaat Program	Masyarakat atau kelompok masyarakat yang paling terabaikan (paling miskin, paling terpencil, dsb)	Sama, tetapi dengan memperhatikan perempuan sebagai kelompok masyarakat yang paling sering terabaikan oleh program pertanian, perikanan dan Irigasi.

a. Perspektif Gender di dalam Daur Program PRA

Penjajagan kebutuhan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki (memperhatikan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender).

- Perencanaan kegiatan yang memperhatikan upaya-upaya penguatan perempuan (memperhatikan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender).
- Pelaksanaan kegiatan yang menyertakan perempuan sebagai peserta aktif program dan pemanfaat langsung (bukan sekedar pemanfaat tidak langsung melalui suaminya).

- Monitoring dan evaluasi program yang memperhatikan perkembangan keadaan dan kedudukan perempuan di dalam masyarakatnya (apakah program berhasil melibatkan secara sungguh-sungguh kelompok perempuan di dalam program).

Tabel berikut menggambarkan kajian keadaan masyarakat dengan menggunakan metode PRA saja dan metode PRA yang berperspektif gender:

	Pengkajian Keadaan Masyarakat Metode PRA	Pengkajian Gender Metode PRA
Pengertian	Pengkajian mengenai keadaan berbagai aspek kehidupan masyarakat (sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, sumber daya, dsb), yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan didampingi oleh petugas program.	Pengkajian keadaan dengan memperhatikan aspek-aspek ketimpangan Gender
Hasil Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran keadaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. • Identifikasi masalah/kebutuhan masyarakat. • Identifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran keadaan masyarakat serta gambaran ketimpangan gender yang berhubungan langsung dengan sektor Pertanian, Perikanan dan Irigasi: identifikasi masalah/kebutuhan strategis perempuan dan laki-laki terhadap pelaksanaan proyek tiga

		<p>sektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi-potensi yang dimiliki perempuan untuk terlibat didalam program pertanian, perikanan dan irigasi.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek (praktis): pengembangan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. • Jangka panjang (strategis): program mampu memberdayakan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek: pengembangan program dengan mempertahankan kebutuhan dan potensi perempuan dan laki-laki. • Jangka panjang: proses penyadaran gender, program mencapai perubahan sosial dengan pemberdayaan masyarakat sekaligus perubahan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi lebih adil dan setara.
Manfaat Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Saling belajar diantara masyarakat dan pelaksana program. • Proses penguatan kemampuan analisis. • Mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saling belajar, dengan melibatkan perempuan. • Penguatan kemampuan analisis masyarakat yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta. • Mengembangkan program

		yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki.
Alat-Alat Kajian	• Teknik-teknik PRA	• Teknik-teknik PRA responsif Gender

b. Teknik-teknik PRA yang Responsif Gender

Secara umum ketimpangan gender dalam pelaksanaan program ETESP Pertanian, Perikanan dan Irigasi lebih banyak terjadi kepada perempuan. Hal ini disebabkan oleh metode penentuan penerima manfaat program yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Cara pandang yang demikian cenderung mengabaikan peranan dan kebutuhan perempuan dalam tahapan program. Pekerjaan yang berhubungan dengan ketiga sektor di atas dianggap hanya layak dikerjakan oleh laki-laki, karena beberapa hal berikut:

- Bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan irigasi lebih banyak menggunakan tenaga fisik sehingga tidak sesuai dilakukan oleh perempuan.
- Pekerjaan yang berhubungan dengan ketiga sektor tersebut selalu dilakukan di luar rumah, sedangkan tugas perempuan berada di wilayah domestik (mengurus keluarga) sehingga menjadi suatu keanehan jika perempuan diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Perempuan tidak harus melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan desa, karena mereka juga akan mendapat manfaat secara tidak langsung dari suami-suaminya.
- Anggapan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan bisa diwakili oleh laki-laki.

- Pengetahuan agama masyarakat, yang menganggap perempuan tidak seharusnya melakukan pekerjaan berat atau bekerja di malam hari, padahal menjaga pintu air dan bertambak adalah pekerjaan yang tetap harus dilakukan di malam hari.
- Kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan pembangunan desa lebih pantas dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perempuan juga merasa tidak nyaman jika harus melakukan pekerjaan berat terutama yang berhubungan dengan perikanan dan irigasi.

Untuk mengubah cara pandang ini diperlukan usaha giat dan berkesinambungan, untuk itu cara persuasif perlu dilakukan oleh pelaksana program agar perempuan dapat terlibat dalam tahapan program. Berikut cara yang bisa dilakukan:

- Pelaksana program harus mensosialisasikan pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam tahapan program. Sasaran utama sosialisasi sebaiknya adalah masyarakat laki-laki.
- Membangun hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa dan meminta mereka untuk juga mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam tahapan program.
- Pendekatan selanjutnya ditujukan untuk kelompok perempuan, hal ini penting dilakukan agar mereka bersedia terlibat dalam tahapan program.
- Penguatan pemahaman mengenai hak-hak perempuan juga penting dilakukan, bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi desa baik formal maupun informal.
- Akan lebih baik lagi jika kepala desa bersedia mengeluarkan surat resmi untuk meminta perempuan agar bersedia terlibat dalam tahapan program. Dengan cara ini perempuan akan merasa lebih nyaman untuk ikut serta.

Penggunaan teknik-teknik PRA yang responsif gender dalam pengembangan program ETESP Pertanian, Perikanan dan Irigasi diharapkan juga membantu pelaksana program dan masyarakat untuk terus menerus belajar meningkatkan kesadaran gendernya.

Teknik-teknik PRA yang responsif gender bisa dilihat di tabel berikut:

Kategori Kajian Gender	Teknik PRA	Hasil Kajian Keadaan dengan Perspektif Gender
Pembagian Kerja Perempuan dan Laki-laki	Kajian Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa pelaku (P/L) jenis-jenis mata pencaharian masyarakat. • Berapa pendapatan (rupiah, volume) yang dihasilkan setiap jenis mata pencaharian. • Perbandingan pendapatan P dan L.
Pembagian Kerja Perempuan dan Laki-laki	Sketsa Kebun, bagan alur kegiatan pertanian	Siapa pelaku (P/L) jenis-jenis kegiatan pengelolaan kebun di dalam suatu keluarga mulai dari persiapan, pengolahan, penyimpanan s/d pemasaran.

<p>Pembagian Kerja Perempuan dan Laki-laki</p>	<p>Kalender Musim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa pelaku (P/L) jenis-jenis kegiatan musiman (produktif/kerja, kegiatan adat, termasuk pembahasan musim kritis seperti musim kemarau dan berjangkitnya penyakit, dsb). • Kapan (bulanan, musiman) terjadi waktu sibuk dan luang bagi P dan L. • Perbandingan volume kerja P dan L.
<p>Peluang dan penguasaan Perempuan dan Laki-laki terhadap Sumber Daya</p>	<p>Pemetaan Sumber Daya Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis sumber daya di desa. • Siapa (P/L) yang memiliki peluang memanfaatkan sumber daya (akses) dan menentukan bagaimana penggunaan sumber daya (kontrol).

<p>Partisipasi Perempuan dan Laki-laki dalam lembaga formal dan informal</p>	<p>Bagan Kelembagaan (Diagram Venn)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jens lembaga formal/informal di dusun/desa/mukim yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. • Apa saja kegiatan lembaga-lembaga tsb. • Susunan organisasi lembaga-lembaga. • Siapa (P/L) yang berperan dalam susunan organisasi lembaga. • Manfaat kegiatan-kegiatan lembaga tsb, menurut perempuan dan laki-laki.
<p>Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga</p>	<p>Sketsa kebun, bagan alur kegiatan pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa pelaku (P/L) jenis-jenis kegiatan pengelolaan kebun di dalam suatu keluarga mulai dari persiapan, pengolahan, penyimpanan sampai pemasaran. • Siapa menentukan (P/L) kegiatan-kegiatan pengelolaan kebun.

Pengkajian Wilayah dengan Metode PRA

- Pengkajian wilayah adalah kegiatan penelitian tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan dipandu oleh lembaga pengembang program.
- Tujuan pengkajian wilayah dengan metode PRA adalah membantu masyarakat desa untuk memahami keadaannya sendiri dan lingkungannya.

Pengkajian wilayah yang berperspektif gender yaitu; pengkajian keadaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan (ekonomi, lingkungan, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, kelembagaan, dan lain sebagainya), dengan memperhatikan perbedaan dan persamaan keadaan (kondisi) dan peran (kedudukan) antara laki-laki dan perempuan.

Hasil pengkajian wilayah

- Sejumlah informasi tentang keadaan atau kondisi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Sejumlah masalah atau kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat sendiri.
- Sejumlah potensi lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya pengembangan kegiatan masyarakat.

Jenis-jenis dan tujuan pengkajian wilayah (PRA)

1. PRA untuk penjajagan kebutuhan dan perencanaan kegiatan → bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji masalah yang dirasakan mengganggu kesejahteraan hidup mereka serta mengapa masalah itu terjadi.
2. PRA untuk monitoring dan evaluasi kegiatan → bertujuan membantu masyarakat menilai hasil program yang mereka kembangkan sendiri.

Beberapa cara di bawah ini dapat dijadikan panduan dalam mengoptimalkan mengakomodir kebutuhan perempuan, metode-metodenya sebagai berikut:

1. *Interview* atau dikenal dengan **wawancara** dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung baik dari perorangan maupun secara berkelompok. Metode ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan orang-orang yang akan diminta informasinya. Penting sekali menggunakan bahasa yang familiar dengan individu atau kelompok yang akan di *interview* dengan menggunakan teknik *interview* serta panduan *interview* yang telah disiapkan
2. **Curah pendapat** atau *sharing*.
3. **Presentasi dan tanya jawab** merupakan sebuah metode pemaparan yang diiringi dengan sesi tanya jawab. Metode ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu terhadap orang lain. Informasi yang disampaikan haruslah menggunakan teknik komunikasi *assertive* atau komunikasi yang setara dan 2 arah, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Pada sesi tanya jawab, porsi yang disediakan untuk bertanya haruslah berimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki dengan fokus. Setiap pertanyaan akan disikapi dengan tingkat keseriusan yang sesuai dengan isu yang disampaikan.
4. **Voting (pengambilan suara terbanyak)** suatu metode yang digunakan apabila terdapat beberapa pilihan yang mendapat skor sama tingginya. *Voting* yang dilakukan harus dimulai dengan pemahaman yang sama oleh peserta untuk melihat tingkat prioritas yang lebih, tidak berkaitan dengan apakah kesepakatan tersebut untuk laki-laki atau perempuan tapi lebih difokuskan pada kebutuhan yang *urgent* untuk memaksimalkan pencapaian kesuksesan sebuah program. Metode ini efisien karena setiap orang dapat memberikan suara secara langsung tanpa perlu diwakili oleh orang lain. Namun metode ini sangat bergantung pada jumlah kehadiran, jadi perlu sekali memastikan jumlah kehadiran perempuan dengan perbandingan yang minimal sama dengan kehadiran laki-laki.

c. Langkah-langkah Praktis Pelaksanaan Pertemuan yang Responsif Gender

Langkah-langkah praktis yang dapat digunakan untuk sektor pertanian dan irigasi untuk mengintegrasikan PUG adalah pada rapat Pleno. dapat dimulai dengan keterlibatan yang setara antara perempuan dan laki-laki pada pertemuan-pertemuan yang membahas perencanaan, misalnya pada pengurus P3A atau rapat *Keujreunblang* di tingkat desa. Tentu saja keterlibatan perempuan di dalamnya harus dimulai dengan mengakui keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan di P3A.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan PUG secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi langsung pada pertemuan kelompok-kelompok perempuan, misalnya kelompok wirid Yasin, kelompok PKK dan kelompok perempuan lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk menjemput langsung informasi tentang kebutuhan, pendapat dan solusi alternatif yang ditawarkan oleh perempuan terhadap masalah dan kebutuhan yang mereka hadapi. Selain itu dapat pula mengundang perempuan dalam rapat khusus, sebelum rapat umum dilakukan.
2. Mengundang langsung kehadiran perempuan untuk hadir pada pertemuan-pertemuan bahkan bila memungkinkan menuliskan langsung nama perempuan dilembar undangan atau meminta perempuan secara khusus dan berhadapan langsung untuk meminta mereka hadir.
3. Memastikan keterlibatan perempuan minimal 40% dalam Rapat Umum dan diprioritaskan peserta perempuan yang hadir adalah representasi dari perempuan yang hadir di rapat khusus perempuan.

4. Menunda pertemuan apabila persentase kehadiran Perempuan belum mencukupi.
5. Melaksanakan pertemuan pada waktu-waktu dimana perempuan dapat hadir dan tidak sedang direpotkan dengan kerja-kerja domestik. Waktu-waktu yang dapat digunakan oleh perempuan untuk hadir biasanya pada siang atau sore hari. Bila pertemuan terpaksa dilakukan pada malam hari, maka keamanan dan kenyamanan perempuan untuk hadir, harus sangat diperhatikan, misalnya dengan mempertimbangkan penerangan pada pertemuan tersebut, penyediaan posisi duduk untuk perempuan (tidak diambang pintu atau berhimpitan dengan laki-laki), dan perlu juga diatur mekanisme menjemput dan mengantar para perempuan untuk kembali ke rumah, khususnya perempuan yang tidak didampingi suami, perempuan muda yang menjadi kepala rumah tangga atau perempuan janda.
6. Meminta secara khusus perempuan-perempuan untuk bicara dan mengeluarkan pendapatnya.
7. Men-*design* tempat pertemuan seramah mungkin, misal dengan disediakan kamar mandi yang aman dan nyaman (tertutup) dengan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan. Karena, ketersediaan kamar mandi dan jumlah air yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh perempuan khususnya perempuan yang dalam kondisi khusus (hamil atau menstruasi) terlebih bila pertemuan dilakukan pada durasi waktu yang lumayan lama. Selain ketersediaan kamar mandi dan air bersih, lokasi pertemuan juga perlu diperhatikan sehingga tidak menjadi kendala oleh perempuan untuk hadir pada pertemuan tersebut. Idealnya, jarak tempuh tidak melebihi ± 200 meter.

8. Menyediakan ruang bagi anak-anak karena perempuan dan anak sangat berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Saat perempuan pergi ke luar dari rumah untuk tujuan apapun, keberadaan perempuan tidak dapat dipisahkan dengan anak. Berada pada lokasi dan tempat yang berbeda dapat menyebabkan perempuan tidak tenang dan tidak berkonsentrasi baik. Maka penyediaan tempat untuk anak-anak menjadi kebutuhan bagi perempuan yang terlibat dalam pertemuan.
9. Mensosialisasikan hasil Rapat Umum kepada semua masyarakat, termasuk perempuan dan pastikan semua orang memperoleh informasi tersebut.
10. Pengorganisasian kelompok perempuan.
11. Penguatan kapasitas perempuan, yang dapat dilakukan dengan kajian-kajian, diskusi, training-training ketrampilan manajemen organisasi, kepemimpinan.
12. Pentingnya forum-forum bersama antara laki-laki dan perempuan untuk kajian penguatan hak-hak perempuan.

D. Pelaksanaan Pembangunan yang Responsif Gender

Pada proses pelaksanaan pembangunan sendiri, semua partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan haruslah terlibat secara maksimal. Namun sangat disayangkan, banyak kebutuhan yang tidak termaktub dalam perencanaan sebelumnya yang tidak terakomodir sehingga akhirnya menjadi kendala yang selalu dirasakan oleh masyarakat kita. Kebutuhan perempuan sebagai pihak yang juga melakukan pembangunan, tanpa disadari menjadi terabaikan. Hal ini dikarenakan oleh ketidakikutsertaan perempuan dalam proses

perencanaan yang berakibat tidak tersampainya segala kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Oleh karena itu, pelaksanaan PUG perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut³:

1. pemampuan para pelaksana PUG.
2. penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian.
3. pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain:
 - forum komunikasi.
 - kelompok kerja.
 - panitia pengarah.
 - tim penggerak PUG (*gender focal point*).
4. pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen ke segenap jajaran pemerintah dan swasta serta di semua tingkatan, propinsi, kabupaten dan kota. Pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua *stakeholders* dalam proses PUG.
5. pembentukan kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melibatkan perempuan dalam kegiatan identifikasi desanya secara khusus dengan metode-metode partisipatif.
- 2) mengumpulkan dan membuat laporan hasil temuan-temuan secara tertulis dan melakukan analisa serta verifikasi untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi berdasarkan hasil temuan tersebut.

³ BKKBN-Kementerian Negara PP-UNFPA, *Pengarusutamaan Gender*, 2005 hal.

E. Monitoring Evaluasi⁴ yang Responsif Gender

Monitoring adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efisien.

Evaluasi adalah salah satu komponen dari kegiatan pengolahan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan program dan kegiatan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca kegiatan.

Monitoring:

- 1). Dapat dipertanggungjawabkan.
- 2). Tepat waktu.
- 3). Sederhana: efektif dan efisien (tepat guna).
- 4). Transparan, dapat dipercaya dengan data yang valid.
- 5). Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.
- 6). Adanya indikator dan tolak ukur.

Monitoring evaluasi PUG mencakup pertanyaan-pertanyaan:

- 1). Sejauh mana prakondisi dan komponen kunci PUG telah ada.
- 2). Sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber-sumber daya dan fasilitas-fasilitas serta pelayanan-pelayanan kegiatan.

⁴ BKKBN-Kementerian Negara PP-UNFPA, *Pengarusutamaan Gender*, 2005
hal. 277

- 3). Sejauh mana para staf, mitra kerja dan kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki telah atau belum berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan program.
- 4). Sejauh mana kinerja kegiatan staf telah responsif Gender.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk Monitoring dan Evaluasi

- 1) monev dilakukan untuk melakukan pengawasan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta mendapatkan pembelajaran dari proses yang telah dilalui yang nantinya akan dijadikan rekomendasi ke depan.
- 2) Melakukan pertanggungjawaban terhadap segala proses-proses kegiatan yang telah dilakukan, baik dari sisi anggaran maupun dampak program tersebut terhadap masyarakat.
- 3) penyampaian laporan ke masyarakat dan mendapatkan masukan serta juga sekaligus melakukan pendidikan bagi dan oleh masyarakat itu sendiri.

G. Anggaran yang Responsif Gender

Kebijakan yang telah memiliki sensitif Gender juga harus diimbangi dengan anggaran yang memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dari anggaranlah akan dapat diketahui secara detail pengalokasian dana tertentu bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas dan yang selama ini tidak diperhatikan dalam proses pembangunan. Kalau memang mengharuskan anggaran yang diperuntukkan untuk *affirmative action* bagi perempuan maka sebagai sebuah kebutuhan dengan skala prioritas utama maka itu harus dikeluarkan dan direalisasikan.

B A B III

BAGAIMANA MENGUKUR TERINTEGRASI PUG DALAM PROGRAM

A. Pengantar

Ketika suatu program menggunakan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Keadilan Gender sudah tercapai, maksudnya kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki dalam suatu program. Perlakuan yang adil ini juga dapat dilihat dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam suatu program. Apakah peran, akses, kontrol, manfaat, serta partisipasi berjalan dengan baik.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai suatu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, harus dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, dan program yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

B. Cara memastikan PUG diintegrasikan dalam Program

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan PUG diintegrasikan dalam program antara lain membandingkan perencanaan dengan hasil yang dicapai dengan memperhatikan prosesnya apakah partisipatif atau mempertimbangkan aspek gender. Untuk itu alat yang dapat digunakan adalah menggunakan form yang memuat pertanyaan-pertanyaan, mengkaji profil

kegiatan masyarakat khususnya di lokasi sekitar pelaksanaan program dan juga laporan-laporan dari hasil kegiatan.

Selain itu dalam mengukur juga harus mengandung tiga hal yaitu kuantiti, kualitas dan batas waktu. Untuk dapat memastikan PUG diintegrasikan dalam program dapat dimulai dari beberapa hal dibawah ini:

1. Desain Program (Visi dan Misi)

Ketika akan memulai sebuah program perlu dilihat apakah ada visi dan misi yang jelas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maksudnya bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelola pembangunan, yang berhubungan dengan sumber daya ekonomi, politik, sosial, informasi, pendidikan, budaya dan agama. Ini bertujuan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Pencapaian dapat ditandai dengan:

- Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan laki-laki serta anak pada semua kebijakan, program, dan kegiatannya.
- Adanya pencapain yang jelas secara kualitatif dan kuantitatif terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.
- Berperannya lembaga sosial kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan laki-laki disuatu lokasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran pembangunan yang hendak dicapai apakah untuk peningkatan status, posisi dan kondisi perempuan dan laki-laki.
- Adanya usaha-usaha untuk peningkatan kapasitas perempuan dan laki-laki.

2. Perencanaan

Pada saat penyusunan perencanaan ada dua hal yang terpenting yaitu:

a. Perencanaan kebijakan:

- Apakah dalam perencanaan kebijakan ada penentuan tujuan, sasaran, para pelaksana, tata laksana kerja diatur dalam sebuah perangkat peraturan atau mekanisme yang adil antara perempuan dan laki-laki.
- Adakah aturan atau mekanisme diatur secara khusus untuk mengupayakan agar partisipasi perempuan dan laki-laki sama. Misalnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dll.

b. Perencanaan Program:

Dalam perencanaan program harus dilihat apakah dalam penyusunan perencanaan mengacu pada empat aspek yaitu seperti; peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan yang respon gender di berbagai bidang.

Tahapan perencanaan program dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pendataan masalah dan kebutuhan:

- Apakah ada data yang terpilah tentang permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki.
- Apakah ada kelas-kelas tertentu yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi peran, status, akses dan control. Misalnya antara si kaya dan miskin atau golongan raja dan rakyat jelata.
- Apakah ada prioritas kebutuhan berdasarkan permasalahan yang muncul antara perempuan dan laki-laki.

- Apakah ada pengalokasian anggaran yang dapat memenuhi prioritas kebutuhan tersebut yang sesuai gender.
- Apakah ada daftar tentang jumlah dan sumber daya (kualitatif dan kuantitatif) perempuan dan laki-laki dari suatu lokasi yang akan dilaksanakannya program.
- Apakah ada dilakukan analisis terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya antara perempuan dan laki-laki sebelum program berjalan. Untuk mempertimbangkan peran, status, akses, kontrol, manfaat serta dan dampaknya bagi perempuan dan laki-laki dari pelaksanaan suatu program.

2). Perumusan Kebutuhan dan Penyusunan Kegiatan

- Adakah rapat atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan perempuan dan laki-laki secara adil ketika penyusunan perencanaan.
- Adakah undangan khusus yang ditujukan untuk perempuan dan laki-laki.
- Bagaimana pengaturan rapat atau pertemuan misalnya tempat, waktu dan pemilihan peserta rapat, apakah berdasarkan gender.
- Adakah jumlah kehadiran perempuan minimal 40 %.
- Adakah pra pertemuan yang dilakukan kepada kelompok perempuan untuk melatih mereka berpendapat sebelum ikut dalam pertemuan yang lebih besar.
- Adakah mekanisme sanksi bila dalam suatu rapat atau pertemuan tersebut tidak melibatkan perempuan secara adil.
- Apakah setiap usulan/pendapat kelompok perempuan diterima dan dimasukkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam atau pelaksanaan program.

3). Pelaksanaan Program

Untuk melihat apakah Pengarusutamaan Gender (PUG) telah terintegrasi dalam program pada tahap pelaksanaan ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Siapa saja yang menjadi pelaksana program, apakah laki-laki atau perempuan.
- Apakah pelaksana program tersebut berasal dari masyarakat setempat atau dari luar lokasi program.
- Bagaimana keterlibatan atau partisipasi perempuan dan laki-laki ini dapat terlihat dari struktur kelembagaan. Misalnya apakah menempati posisi strategis atau hanya peran tambahan saja.
- Siapa yang menjadi penanggung jawab, apakah laki-laki atau perempuan.
- Apakah ada mempertimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan.
- Bagaimana peran-peran yang diatur antara perempuan dan laki-laki.
- Adakah peran-peran khusus (posisi strategis) bagi perempuan untuk mengakomodir kebutuhan strategis perempuan.
- Apakah terbentuk dan berjalan kelompok forum komunikasi (*vocal point*) tentang gender.
- Apakah tersedia sarana dan prasarana (alat dan fasilitas penunjang lainnya) yang disesuaikan dengan kondisi perempuan atau laki-laki. Contoh salah satu desa penelitian di sektor pertanian, ada yang menyampaikan akan lebih baik misalnya menciptakan cangkul yang disesuaikan dengan kondisi fisik perempuan (ringan dan bisa dipegang, tidak berat, dapat digunakan untuk waktu lama).
- Bagaimana usaha-usaha peningkatan kapasitas dilakukan secara adil untuk perempuan dan laki-laki. Kapasitas yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknis operasional.

- Tersediakah daftar bentuk peningkatan kapasitas yang telah dan akan dilaksanakan, yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

4). Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkah-langkah analisis yang telah dilakukan, apakah perencanaan sesuai dengan hasil yang dicapai. Monitoring yang dilakukan juga harus berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Berikut hal-hal yang menjadi tolak ukurnya adalah:

- Siapa saja yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, perempuan atau laki-laki?
- Apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam partisipasi perempuan secara aktif.
- Adakah faktor-faktor pendorong yang mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki lebih maksimal.
- Sejauhmana perubahan terjadi untuk menghilangkan atau memperkecil kesenjangan gender.
- Pembelajaran apa saja yang diperoleh dalam proses pelaksanaan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
- Apakah ada ide-ide baru untuk memaksimalkan peran dan manfaat program bagi perempuan dan laki-laki.
- Hal apa saja yang perlu direkomendasikan untuk perbaikan program dan kebijakan ke depan?

C. CARA MENGUKUR

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur apakah sudah terintegrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah dengan menggunakan alat analisis gender. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu dalam mengukur juga harus mengandung tiga hal yaitu kuantitas, kualitas dan batas waktu. Kuantitas adalah setiap kegiatan yang direncanakan dapat diukur hasilnya secara jelas dengan menggunakan angka-angka, persentase dan lain-lain. Kualitas adalah setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlihat hasilnya dalam bentuk analisis yang diperoleh dari laporan-laporan kegiatan. Batas waktu adalah setiap kegiatan yang direncanakan biasanya dibuat batas waktu pencapaiannya sehingga bila kita ingin melihat hasilnya maka harus memperkirakan apakah tepat waktunya atau apakah hasil tersebut dicapai tetapi melewati batas waktu yang telah direncanakan semula.

Adapun kerangka analisis gender yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Profil kegiatan:

Mengidentifikasi pembagian kerja, alokasi waktu, dan pendapatan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks yang spesifik. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana pembagian kerja baik produktif, reproduktif serta politik, sosial kemasyarakatan yang diatur dalam sebuah keluarga maupun masyarakat.

Untuk menilai keadilan gender telah terlaksana dalam profil kegiatan ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

- a. Apakah pembagian peran-peran ini cukup adil bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Adakah perbedaan waktu yang sangat menyolok antara laki-laki dan perempuan, apakah didominasi oleh laki-laki atau perempuan.
- c. Adakah perbedaan pendapatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan.

2) Profil akses dan kontrol yang mengukur akses dan penguasaan (kontrol) perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber daya.

3) Apakah ada perbedaan akses dan kontrol yang di akibatkan oleh kelas-kelas tertentu misalnya kaya atau miskin secara marginal

4) Profil partisipasi yang memfokuskan pada partisipasi kuantitatif dan kualitatif dalam berbagai kegiatan yang dibedakan menurut jenis kelamin.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setiap kegiatan yang akan direncanakan ada indikatornya. Untuk membuat indikator harus melibatkan *stakeholder* atau kelompok sasaran sehingga ketika mengukur hasil jelas dapat diketahui sudah sejauhmana capaiannya. Proses ini juga salah satu cara meningkatkan transparansi dan partisipasi.

Berikut hal-hal yang dapat diukur untuk melihat keberhasilan:

1. Meningkatnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha.

Ukurannya:

- a. Adanya sejumlah perempuan yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program pembangunan disektor pertanian, perikanan dan irigasi
- b. Sejumlah aktivitas usaha perempuan sudah tercatat dalam data profile desa sebagai bagian dari potensi atau SDM desa
- c. DII

2. Adanya peningkatan keadaan perempuan dari segi jumlah dan kualitasnya dibidang sosial, ekonomi dan politik. Ukurannya:

- a. Adanya perubahan pandangan yang positif dari masyarakat terhadap potensi perempuan
- b. Tercatat sejumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dibidang sosial, ekonomi dan politik
- c. Ada perubahan terhadap proses pengambilan keputusan penting yang mengharuskan melibatkan perempuan
- d. Meningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh kaum perempuan
- e. Ada perubahan pandangan bahwa perempuan tidak lagi dianggap pencari nafkah tambahan.
- f. DII

3. Tingginya akses perempuan terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja, dll). Ukurannya:
 - a. Adanya sejumlah wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki secara adil
 - b. Adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang memudahkan perempuan untuk memperoleh modal
 - c. Adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk meningkatkan atau menguasai teknologi secara maksimal
 - d. Dll

4. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan/ program. Ukurannya:
 - a. Adanya perubahan kondisi dari sejumlah perempuan dan laki-laki bukan saja dari sektor ekonomi tetapi juga peningkatan kapasitas
 - b. Adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan
 - c. Meningkatnya partisipasi perempuan diberbagai bidang dalam pembangunan
 - d. Terpenuhinya kebutuhan strategis Gender (perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya baik dalam lingkup keluarga, komunitas dan masyarakat
 - e. Dll

5. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif. Ukurannya:
 - a. Perempuan dan laki-laki mendapatkan hak-haknya secara adil
 - b. Berkurangnya pertengkaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan
 - c. Adanya kebijakan yang adil yang mengakomodir kebutuhan sesuai jenis kelamin (tentang upah, bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas, pengambilan keputusan dll)
 - d. Berkurangnya gap yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat
 - e. Terbukanya peluang kesempatan dan penguasaan terhadap sumber daya secara adil untuk perempuan dan laki-laki
 - f. DII

6. Ada data terpisah (data Gender). Ukurannya:
 - a. Ada daftar data tentang aktivitas baik ekonomi, social dan politik berdasarkan jenis kelamin
 - b. Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin
 - c. Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin
 - d. Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin
 - e. DII

7. Terpenuhinya kebutuhan praktis Gender (kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran sosial yang diperankan untuk merespon kebutuhan jangka pendek, perbaikan taraf hidup dan pelayanan kesehatan. Ukurannya:
 - a. Adanya usaha ekonomi produktif untuk menopang hidup dalam jangka pendek dan panjang
 - b. Tersedianya fasilitas yang mudah diakses dan sesuai standar kesehatan bagi perempuan dan keluarga
 - c. Berkurangnya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan dan keluarga
 - d. DII

8. Terbentuk dan berjalannya *Gender Focal Point* , Pokja PUG. Ukurannya:
 - a. Adanya pertemuan atau diskusi reguler tentang isu Gender baik ditingkat pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan
 - b. Adanya refleksi atau evaluasi secara berkala untuk melihat sejauhmana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek atau pembangunan
 - c. Ada laporan notulensi hasil pertemuan-pertemuan diatas yang dapat dipertanggung jawabkan
 - d. Adanya perwakilan Pokja PUG yang memiliki komitmen dan pemahaman yang baik tentang isu Gender
 - e. Adanya perencanaan dalam bentuk rencana kerja yang akan dan atau sedang berjalan
 - f. Adanya anggaran khusus yang disediakan untuk aktivitas-aktivitas diatas
 - g. DII

9. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ukurannya:

- a. Berkurangnya laporan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Adanya pembagian peran yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki komitmen dan ketrampilan menjadi pendamping secara sukarela menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Adanya perubahan pandangan dan sikap yang lebih baik dari masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan dan anak
- e. Berkurangnya masalah-masalah psikososial yang diakibatkan oleh Gender
- f. DII

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. Tanpa tahun. *Daftar Periksa (Checklist) Gender*.
- Chitrawati, Buchori, dkk. 2002. *Meningkatkan Partisipasi aktif Perempuan Belajar dari Pengalaman*. Jakarta. World Bank.
- Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan BRR. 2006. *Kebijakan dan Strategi Mengedepankan Kesetaraan Gender dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD-Nias*.
- Dr. Irwan Abdullah, ed. 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- H. Mohammad Said. 1981 (cetakan kedua). *Aceh Sepanjang Abad*.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2000. *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000*. Jakarta: Meneg PP.
- Manual Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Seknas Perempuan PEKKA.
- Modul Pelatihan Analisis Gender*. Care, CIDA.
- Panduan dan Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*. 2005. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan UNFPA.
- Rianingsih Djohani. 1996. *Berbuat Bersama Berperan Bersama, Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*. Bandung: Studio Driya Media.
- Yanti Muchtar, Missiyah. 2005. *Modul Pelatihan untuk Menumbuhkan & Meningkatkan Sensitivitas Keadilan Gender*. Jakarta. Kapal Perempuan.
- Yuniyanti Chuzafah, dkk. 2005. *Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Membangun Perdamaian*. Jakarta. *Search for Common in Indonesia*.